



Analisis Kebijakan RAK LLAJ (Rencana Aksi Keselamatan) dalam Mendorong Kesadaran Masyarakat terhadap Keselamatan Lalu Lintas di Indonesia

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>Ruzica Sevilla Rahma Universitas Muhammadiyah Jakarta ruzicasevilla0502@gmail.com</p> <p>Nancy Fransisca M. Simanjuntak Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri fransiscanancy4@gmail.com</p> <p>Khaerul Umam Noer Universitas Muhammadiyah Jakarta umam.noer@umj.ac.id</p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Rahma, R. S., Simanjuntak, N. F. M., & Noer, K. U. (2025).). Analisis Kebijakan RAK LLAJ (Rencana Aksi Keselamatan) dalam Mendorong Kesadaran Masyarakat terhadap Keselamatan Lalu Lintas di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5215-5221.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas di Indonesia. Dengan menggunakan metode studi literatur dan pendekatan analisis kebijakan publik, partisipasi masyarakat, serta perubahan perilaku, studi ini mengkaji efektivitas pelaksanaan RAK LLAJ yang diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki nilai strategis dalam membentuk budaya tertib lalu lintas, namun implementasinya masih menghadapi tantangan serius, seperti lemahnya sinkronisasi antar tingkat pemerintahan, rendahnya kapasitas kelembagaan daerah, dan partisipasi publik yang minim. Di sisi lain, temuan positif terlihat pada pendekatan edukatif berbasis sekolah, pelatihan safety riding, inovasi digital seperti sistem informasi keselamatan berbasis web, serta intervensi infrastruktur mikro seperti zona selamat sekolah. Analisis juga menunjukkan bahwa perubahan perilaku generasi muda menjadi aspek krusial yang memerlukan strategi pembinaan berbasis nilai dan praktik nyata. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi RAK LLAJ membutuhkan pendekatan integratif lintas sektor, kolaborasi pusat-daerah, serta keterlibatan aktif komunitas dan dunia pendidikan melalui evaluasi partisipatif dan digitalisasi program keselamatan.

Kata Kunci: RAK LLAJ, keselamatan lalu lintas, kebijakan publik, partisipasi masyarakat, edukasi lalu lintas, digitalisasi keselamatan.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Traffic and Road Transportation Safety Action Plan (RAK LLAJ) policy in increasing public awareness of road safety in Indonesia. Using literature review methods and approaches including public policy analysis, community participation, and behavioral change, this study examines the effectiveness of the RAK LLAJ implementation, as mandated by Presidential Regulation Number 1 of 2022. The results indicate that this policy has strategic value in fostering a culture of orderly traffic, but its implementation still faces serious challenges, such as weak synchronization between levels of government, low regional institutional capacity, and minimal public participation. On the other hand, positive findings are seen in school-based educational approaches, safety riding training, digital innovations such as web-based safety information systems, and micro-infrastructure interventions such as school safe zones. The analysis also indicates that behavioral change in the younger generation is a crucial aspect that requires values-based development strategies and practical practices. The study's conclusions emphasize that the successful implementation of the RAK LLAJ requires an integrative cross-sectoral approach, central-regional collaboration, and active community and educational involvement through participatory evaluation and the digitalization of safety programs.

Key Words: RAK LLAJ, traffic safety, public policy, public participation, traffic education, safety digitalization.

A. Pendahuluan

Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) merupakan aspek krusial dalam pembangunan transportasi nasional yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Di Indonesia, tingginya angka kecelakaan lalu lintas mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara, yang tidak hanya mengancam nyawa manusia, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang besar. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam bentuk Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) menjadi instrumen penting dalam upaya menekan angka kecelakaan sekaligus membangun budaya tertib berlalu lintas. RAK LLAJ disusun sebagai turunan dari Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Kebijakan ini mengintegrasikan pendekatan multi-sektoral antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, kepolisian, serta peran aktif masyarakat. Simanjuntak, Labolo, & Rusfianda (2024) menggarisbawahi bahwa RAK LLAJ memiliki nilai strategis karena mampu menjadi panduan operasional pemerintah daerah dalam menyusun program keselamatan transportasi secara sistematis dan berbasis data.

Namun demikian, dalam implementasinya, efektivitas RAK LLAJ belum sepenuhnya optimal. Beberapa studi menunjukkan adanya tantangan dalam sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, minimnya kapasitas kelembagaan, serta lemahnya partisipasi publik. Amri, Aromatica, & Putera (2021) mencatat bahwa meskipun Dinas Perhubungan Kota Padang telah melaksanakan berbagai program peningkatan keselamatan, dampaknya masih terbatas akibat kendala koordinasi dan keterbatasan anggaran. Hal serupa juga ditunjukkan oleh Nariasih, Lemes, & Remaja (2022) dalam kajian di Kabupaten Buleleng yang memperlihatkan bahwa pelaksanaan program keselamatan masih bersifat sektoral dan belum menyentuh akar permasalahan kesadaran masyarakat. Dalam konteks tersebut, perilaku pengendara, khususnya generasi muda, menjadi tantangan tersendiri. Sahara & Syuhada (2023) menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki karakteristik perilaku berkendara yang impulsif dan kurang patuh terhadap rambu lalu lintas. Hal ini diperparah dengan rendahnya literasi keselamatan lalu lintas dan minimnya edukasi berbasis nilai-nilai etika berlalu lintas, sebagaimana diungkapkan Arista, Fauzi, & Elisa (2023) melalui studi pembinaan siswa di Batam.

Untuk menjawab kompleksitas persoalan ini, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap kebijakan RAK LLAJ dalam kerangka meningkatkan kesadaran keselamatan lalu lintas masyarakat secara menyeluruh. Beberapa pendekatan telah dilakukan oleh lembaga terkait, seperti pelatihan safety riding (Puspoprodo & Laila, 2021), sosialisasi di sekolah (Sidjabat, Handayani, & Suryobuwono, 2022), dan pengembangan sistem informasi berbasis web (Sidik, Nining, & Amalia, 2022). Akan tetapi, efektivitas upaya-upaya tersebut masih memerlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Jalal et al. (2023) menekankan pentingnya strategi

berbasis komunitas dan edukasi interaktif yang tidak sekadar bersifat formalitas. Begitu juga dengan pentingnya desain teknis infrastruktur keselamatan seperti penambahan zona selamat sekolah (Ivandri, Maslina, & Ramdan, 2024), perbaikan simpang tidak bersinyal (Sabrina, Tinumbia, & Ihsani, 2022), serta penilaian risiko lalu lintas di jalan tol (Azizah & Supriyatno, 2023), yang semuanya memiliki keterkaitan dengan efektivitas implementasi RAK LLAJ.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: "Bagaimana implementasi kebijakan RAK LLAJ dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan lalu lintas di Indonesia?" Pertanyaan ini penting untuk dijawab karena menyangkut capaian strategis dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas serta membentuk budaya masyarakat yang sadar, patuh, dan peduli terhadap keselamatan berkendara. Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dengan menggunakan pendekatan kebijakan publik, partisipasi masyarakat, dan perubahan perilaku sebagai landasan teoritis. Menurut paradigma kebijakan publik, keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh proses implementasi yang tidak hanya bersandar pada peraturan, tetapi juga pada sejauh mana aktor pelaksana memahami, mendukung, dan melibatkan pihak terkait. Dalam konteks ini, penekanan pada pendekatan partisipatif menjadi krusial.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis implementasi kebijakan RAK LLAJ dalam konteks mendorong kesadaran masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi efektivitas program yang dijalankan, mengevaluasi peran aktor-aktor pelaksana, menelaah dinamika perilaku pengguna jalan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan dalam merancang strategi keselamatan lalu lintas yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang berfokus pada analisis kebijakan publik, partisipasi masyarakat, dan perubahan perilaku sebagai dasar teoritis. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk secara kritis menganalisis pelaksanaan kebijakan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) dalam konteks meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keselamatan lalu lintas di Indonesia. Melalui studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas program yang dilaksanakan, mengevaluasi peran para pelaksana, menelaah dinamika perilaku pengguna jalan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang berfokus pada pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Metode studi literatur dalam penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, dengan mengintegrasikan temuan dari berbagai studi empiris dan praktik terbaik, dengan memungkinkan adanya refleksi kritis terhadap tantangan dan peluang dalam pelaksanaan RAK LLAJ, serta perumusan arah penguatan implementasi di masa depan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan RAK LLAJ dalam Struktur Pemerintahan

Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) merupakan bentuk konkret pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Secara normatif, kebijakan ini bertujuan untuk menjadi pedoman implementatif dalam menciptakan sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai aktor lintas sektoral di tingkat pusat dan daerah. Simanjuntak, Labolo, dan Rusfianda (2024) menekankan bahwa peran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri sangat vital dalam mengkoordinasikan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Sayangnya, hasil di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua daerah memiliki kapasitas kelembagaan dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan program-program RAK LLAJ secara efektif. Hal ini menyebabkan perbedaan capaian antar wilayah, dengan beberapa daerah yang aktif mendorong inisiatif keselamatan, sementara yang lain masih stagnan dalam tahap perencanaan. Nariasih, Lemes, dan Remaja (2022) dalam penelitiannya di Kabupaten Buleleng mengungkapkan bahwa pelaksanaan program keselamatan LLAJ seringkali bersifat sektoral dan belum terintegrasi dengan baik antar unit

pemerintah daerah. Akibatnya, program keselamatan lalu lintas yang dijalankan tidak mampu menyentuh akar permasalahan kesadaran masyarakat secara menyeluruh.

2. Efektivitas Program Keselamatan di Daerah

Evaluasi terhadap implementasi program keselamatan di berbagai daerah menunjukkan adanya variasi efektivitas yang tinggi. Di Kota Padang, Amri, Aromatic, dan Putera (2021) menemukan bahwa meskipun program peningkatan keselamatan telah diluncurkan, dampaknya belum signifikan karena keterbatasan koordinasi dan kurangnya evaluasi berkala. Hal ini diperparah dengan lemahnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan program. Di sisi lain, Jalal et al. (2023) menunjukkan bahwa strategi kepolisian di Kabupaten Merauke telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengedukasi masyarakat. Mereka mengadopsi pendekatan persuasif dengan melakukan kampanye keselamatan secara langsung di titik-titik rawan kecelakaan. Hal ini membuktikan bahwa peran lembaga penegak hukum yang aktif dan humanis dapat menjadi katalisator kesadaran masyarakat.

3. Perubahan Perilaku Generasi Muda dan Tantangannya

Salah satu tantangan utama dalam mendorong keselamatan lalu lintas adalah perubahan perilaku generasi muda, yang saat ini menjadi pengguna jalan terbesar. Sahara dan Syuhada (2023) mengungkapkan bahwa generasi Z menunjukkan kecenderungan berkendara yang impulsif, kurang disiplin, dan minim perhatian terhadap rambu-rambu lalu lintas. Hal ini menjadi bukti bahwa pembinaan dan edukasi belum menyentuh pada aspek internalisasi nilai. Beberapa pendekatan telah dicoba untuk mengatasi hal ini. Arista, Fauzi, dan Elisa (2023) meneliti pembinaan keselamatan berkendara di SMK Widya Batam dan menemukan bahwa integrasi antara edukasi formal dan etika berkendara dapat membantu meningkatkan kesadaran berlalu lintas pada siswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelibatan lembaga pendidikan dalam kebijakan keselamatan lalu lintas merupakan langkah strategis. Puspoprodo dan Laila (2021) juga menyoroti pentingnya safety riding education sebagai sarana meningkatkan pemahaman dan kesadaran keselamatan bagi usia remaja dan produktif. Edukasi berbasis praktik, simulasi, dan contoh nyata jauh lebih efektif dibandingkan ceramah konvensional.

4. Infrastruktur dan Teknologi sebagai Faktor Pendukung Keselamatan

Faktor fisik seperti desain jalan, marka, dan fasilitas penunjang turut menentukan efektivitas kebijakan keselamatan lalu lintas. Sabrina, Tinumbia, dan Ihsani (2022) dalam kajiannya menggunakan metode *Traffic Conflict Technique* (TCT) pada simpang tak bersinyal, menunjukkan bahwa banyak kecelakaan disebabkan oleh lemahnya manajemen lalu lintas di titik-titik konflik. Oleh karena itu, perbaikan teknis harus menjadi bagian integral dari implementasi RAK LLAJ. Selain itu, inovasi teknologi juga mulai diadopsi untuk mendukung keselamatan. Sidik, Nining, dan Amalia (2022) mengembangkan sistem informasi berbasis web yang memberikan panduan keselamatan berlalu lintas secara digital. Media ini menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyebarkan informasi secara cepat dan akurat. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi merupakan peluang besar dalam mendekati masyarakat pada isu keselamatan. Penerapan zona selamat sekolah sebagaimana dilakukan di SMA Negeri 9 Balikpapan (Ivandri, Maslina, & Ramdan, 2024) juga menjadi contoh konkret intervensi berbasis infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan zona aman ini menurunkan tingkat kecelakaan pada jam-jam sekolah secara signifikan.

5. Strategi Edukasi dan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas

Edukasi publik dan kampanye sadar keselamatan menjadi aspek penting dalam implementasi kebijakan RAK LLAJ. Penelitian oleh Mardikawati, Suartawan, dan Mulyaningtyas (2023) mengenai pelatihan keselamatan lalu lintas menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan angka kecelakaan di komunitas target. Pelatihan bersifat preventif dan membangun kepedulian kolektif masyarakat. Begitu pula, Sidjabat, Handayani, dan Suryobuwono (2022) membuktikan bahwa sosialisasi sadar keselamatan yang dilakukan kepada siswa SMA Negeri 8 Jakarta berhasil meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap rambu lalu lintas. Program ini juga memperlihatkan bahwa intervensi di usia remaja merupakan waktu strategis dalam membentuk kebiasaan aman berkendara. Siswanto et al. (2023) mendukung temuan ini melalui kegiatan penyuluhan keselamatan lalu lintas di SMK Negeri 2 Subang, yang berhasil meningkatkan pemahaman siswa terhadap pentingnya keselamatan dan etika berlalu lintas. Pembelajaran berbasis kasus nyata dan pengalaman nyata jauh lebih diterima oleh peserta didik dibandingkan metode ceramah pasif.

6. Analisis Tantangan dan Peluang Implementasi RAK LLAJ

Berdasarkan hasil kajian di berbagai daerah dan institusi, dapat disimpulkan bahwa implementasi RAK LLAJ masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi struktural maupun kultural. Tantangan struktural meliputi koordinasi antar lembaga yang belum optimal, keterbatasan anggaran daerah, hingga lemahnya pengawasan dan evaluasi program. Di sisi lain, tantangan kultural mencakup rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya literasi lalu lintas, serta adanya resistensi terhadap perubahan perilaku. Meski demikian, peluang untuk memperkuat pelaksanaan RAK LLAJ terbuka luas. Pertama, meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya keselamatan pasca pandemi COVID-19 dapat dimanfaatkan sebagai momentum perubahan. Kedua, kemajuan teknologi digital memungkinkan pemerintah untuk memperluas jangkauan kampanye keselamatan secara efektif dan murah. Ketiga, keterlibatan sekolah, komunitas, dan lembaga sosial lainnya dapat memperluas basis pelaksana kebijakan secara inklusif.

7. Pendekatan Integratif dalam Implementasi RAK LLAJ

Keberhasilan kebijakan RAK LLAJ dalam meningkatkan kesadaran keselamatan lalu lintas sangat bergantung pada pendekatan integratif yang menyeluruh dan holistik. Tidak cukup hanya dengan menyusun rencana kerja dan alokasi anggaran tahunan, tetapi dibutuhkan pemahaman bersama bahwa keselamatan lalu lintas adalah tanggung jawab bersama lintas sektor, bukan semata-mata tugas Dinas Perhubungan atau Kepolisian Lalu Lintas. Sebagai contoh, dalam kajian Simanjuntak, Labolo, dan Rusfianda (2024), ditekankan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam penerapan RAK LLAJ, khususnya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian, rumah sakit, lembaga pendidikan, dan kelompok masyarakat sipil. Perencanaan keselamatan lalu lintas harus mencakup perspektif promotif (edukasi), preventif (pencegahan kecelakaan), kuratif (penanganan pascakecelakaan), hingga rehabilitatif (pemulihan korban). Program yang berhasil adalah program yang melibatkan komunitas secara aktif. Dalam konteks ini, LSM dan komunitas pecinta keselamatan lalu lintas dapat menjadi agen perubahan sosial. Masyarakat dapat dilibatkan dalam forum lalu lintas, relawan pengawas jalan, hingga gerakan sadar helm di sekolah-sekolah. Keterlibatan ini mengaktifkan konsep *citizen-based approach*, di mana warga negara bukan hanya objek, tetapi juga subjek dari proses keselamatan lalu lintas. Sidik, Nining, dan Amalia (2022) menyoroti potensi teknologi digital sebagai penghubung lintas aktor dan sebagai medium kontrol partisipatif masyarakat. Sistem informasi keselamatan berbasis web yang mereka gagas memungkinkan masyarakat melaporkan titik-titik rawan kecelakaan, pelanggaran lalu lintas, serta meminta akses edukasi berbasis daring. Hal ini juga mempercepat proses advokasi kebijakan dan penyesuaian program daerah terhadap kebutuhan lokal.

8. Indikator Keberhasilan dan Evaluasi Dampak

Untuk menilai keberhasilan implementasi RAK LLAJ dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas, diperlukan indikator yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, indikator utama adalah penurunan angka kecelakaan, fatalitas, dan pelanggaran lalu lintas dalam rentang waktu tertentu. Namun indikator ini harus dibarengi dengan indikator kualitatif seperti tingkat pengetahuan masyarakat, perubahan perilaku berkendara, serta partisipasi warga dalam kegiatan keselamatan. Sabrina, Tinumbia, dan Ihsani (2022) menunjukkan bahwa simpang jalan yang tidak dikelola dengan baik menghasilkan konflik lalu lintas tinggi yang meningkatkan potensi kecelakaan. Namun setelah dilakukan edukasi dan pembenahan teknis, terjadi penurunan jumlah konflik signifikan. Ini menunjukkan bahwa intervensi simultan (fisik dan edukatif) dapat berdampak langsung pada keselamatan. Selain itu, Ivandri, Maslina, dan Ramdan (2024) menemukan bahwa penerapan zona selamat sekolah dapat menjadi indikator keberhasilan kebijakan berbasis infrastruktur mikro. Keberhasilan dapat dilihat dari meningkatnya jumlah anak sekolah yang merasa aman saat menyeberang jalan serta pengurangan keluhan masyarakat tentang zona rawan lalu lintas di sekitar sekolah. Evaluasi juga harus dilakukan secara berkala dan transparan, melibatkan unsur masyarakat. Transparansi dalam evaluasi akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program keselamatan dan mendorong keterlibatan lebih luas. Nariasih, Lemes, dan Remaja (2022) menegaskan pentingnya audit keselamatan lalu lintas sebagai alat evaluasi yang obyektif dan mendalam, serta sebagai dasar koreksi kebijakan di daerah.

9. Pembelajaran dari Studi Empiris dan Best Practices

Dari studi-studi yang dikaji dalam penelitian ini, dapat diidentifikasi beberapa praktik terbaik (*best practices*) yang dapat dijadikan acuan nasional. Pertama, program pelatihan keselamatan yang dilakukan dengan metode partisipatif dan praktikal seperti yang dikaji

Mardikawati, Suartawan, dan Mulyaningtyas (2023), terbukti jauh lebih efektif dibanding sekadar sosialisasi formal. Kedua, sosialisasi sadar keselamatan kepada kelompok usia muda, sebagaimana dilakukan oleh Sidjabat, Handayani, dan Suryobuwono (2022), memiliki dampak jangka panjang dalam membentuk perilaku. Hal ini karena usia muda merupakan masa pembentukan kebiasaan, dan ketika nilai-nilai keselamatan ditanamkan secara konsisten, mereka berpotensi menjadi pelopor keselamatan di masa depan. Ketiga, pentingnya memperkuat sistem pelaporan kecelakaan dan pelanggaran, serta menindaklanjutinya dengan tindakan korektif cepat. Jalal et al. (2023) mencontohkan bagaimana strategi polisi di Merauke dengan pendekatan humanis tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga menyertakan proses edukatif sehingga pelanggar tidak mengulangi kesalahan. Keempat, integrasi antara lembaga pendidikan dan lembaga pemerintah perlu dijadikan kebijakan nasional yang diwajibkan. Pembelajaran lalu lintas tidak seharusnya menjadi materi tambahan, tetapi masuk dalam kurikulum formal pendidikan dasar dan menengah. Program pembinaan seperti di SMK Widya Batam dan SMK Negeri 2 Subang telah menunjukkan efektivitas tinggi (Arista et al., 2023; Siswanto et al., 2023).

10. Refleksi Kritis terhadap Pelaksanaan Kebijakan

Meskipun berbagai langkah telah diambil, pelaksanaan kebijakan RAK LLAJ masih menghadapi tantangan sistemik. Banyak daerah belum menyusun dokumen RAK LLAJ daerah secara rinci atau hanya menjadikannya dokumen formalitas semata. Ketika perencanaan tidak dibarengi dengan alokasi anggaran memadai dan dukungan politis dari kepala daerah, maka program-program tidak akan berjalan optimal. Ada pula kecenderungan pelaksanaan program yang bersifat simbolis dan seremonial. Misalnya, kegiatan “bulan keselamatan lalu lintas” hanya berlangsung sekali dalam setahun dan tidak dilanjutkan dengan program tindak lanjut. Ini menyebabkan kesadaran masyarakat hanya bersifat sementara dan tidak menghasilkan perubahan perilaku jangka panjang. Refleksi lainnya adalah kurangnya pelibatan masyarakat akar rumput dalam perencanaan. Padahal masyarakat lokal yang memahami titik-titik risiko di lingkungan mereka. Memberdayakan masyarakat lokal melalui musyawarah desa atau forum warga adalah kunci untuk menciptakan kebijakan yang sesuai konteks sosial dan geografis daerah tersebut.

11. Arah Penguatan Implementasi ke Depan

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa langkah konkret yang dapat menjadi arah penguatan implementasi RAK LLAJ:

1. Meningkatkan Kapasitas Daerah: Melalui pelatihan teknis penyusunan RAK LLAJ dan pembentukan unit kerja lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah) khusus keselamatan lalu lintas.
2. Penguatan Regulasi Lokal: Membentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Surat Keputusan Kepala Daerah yang memperkuat implementasi RAK LLAJ secara kontekstual.
3. Pelibatan Sektor Pendidikan dan Swasta: Mendorong sekolah, kampus, perusahaan, dan pelaku transportasi umum untuk ikut serta dalam kampanye keselamatan.
4. Digitalisasi Edukasi: Mengembangkan platform edukatif online, seperti *game simulasi lalu lintas*, modul e-learning keselamatan, dan aplikasi pelaporan pelanggaran.
5. Monitoring dan Evaluasi Partisipatif: Melibatkan komunitas, media, dan LSM dalam mengevaluasi pelaksanaan program secara terbuka.

Kebijakan RAK LLAJ memiliki potensi besar dalam membentuk masyarakat yang sadar dan peduli terhadap keselamatan lalu lintas. Namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi, partisipasi masyarakat, konsistensi edukasi, serta dukungan infrastruktur dan teknologi. Integrasi antar sektor dan sinergi antara pusat dan daerah menjadi prasyarat utama agar kebijakan ini tidak hanya menjadi dokumen normatif, melainkan menjadi gerakan nasional untuk menyelamatkan nyawa di jalan raya.

D. Kesimpulan

Kebijakan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) merupakan instrumen penting di Indonesia untuk mengurangi kecelakaan dan membangun budaya tertib berlalu lintas, yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Namun, implementasinya belum optimal akibat tantangan seperti kurangnya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, keterbatasan kapasitas kelembagaan, minimnya partisipasi publik, serta perilaku impulsif generasi muda. Meskipun demikian, keberhasilan program terlihat pada pendekatan persuasif kepolisian dan edukasi terintegrasi dengan etika berkendara,

terutama bagi remaja. Perbaikan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi digital juga mendukung efektivitas kebijakan. Untuk menguatkan implementasi RAK LLAJ, diperlukan edukasi publik yang aktif dan kampanye keselamatan partisipatif. Tantangan struktural dan kultural masih ada, namun peluang penguatan terbuka melalui peningkatan kesadaran publik, kemajuan teknologi digital, dan pelibatan sektor pendidikan serta komunitas. Keberhasilan RAK LLAJ sangat bergantung pada pendekatan integratif, kolaborasi lintas sektor, pelibatan aktif masyarakat (citizen-based approach), serta evaluasi yang transparan dan berkala. Langkah-langkah ke depan meliputi penguatan kapasitas daerah, regulasi lokal, pelibatan sektor pendidikan dan swasta, digitalisasi edukasi, serta monitoring dan evaluasi partisipatif untuk menjadikan RAK LLAJ sebagai gerakan nasional yang efektif.

E. Referensi

- Amri, R., Aromatica, D., & Putera, R. E. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.20527/jpp.v2i1.2769>
- Azizah, A. N., & Supriyatno, D. (2023). Penentuan Tingkat Keselamatan Lalu Lintas Di Jalan Tol Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005. *Jurnal Media Publikasi Terapan Transportasi*, 1(3), 315–325. <https://doi.org/10.26740/mitrans.v1n3.p315-325>
- Jalal, N., Moenta, P. A., Syahrudin, & Pasalli, D. A. (2023). Strategi Kepolisian Dalam Meningkatkan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kabupaten Merauke. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 952–960.
- Keselamatan, J., Ivandri, A., Ramdan, M., & Balikpapan, U. (2024). Penerapan zona selamat sekolah terhadap keselamatan penyeberangan jalan pelajar sma negeri 9 Balikpapan. *Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindungan Lingkungan*, 10(1), 82–87.
- Mardikawati, B., Suartawan, P. E., & Mulyaningtyas, D. O. (2023). Pelatihan Keselamatan Berlalu Lintas sebagai Upaya Preventif Menurunkan Angka Kecelakaan. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 169–180. <https://doi.org/10.55983/empjcs.v2i4.414>
- Nariasih, L. P., Lemes, I. N., & Remaja, I. N. G. (2022). Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Dalam Pelaksanaan Program Keselamatan Perhubungan Darat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan. *Kertha Widya*, 10(1), 45–75. <https://doi.org/10.37637/kw.v10i1.1034>
- Puspoprodjo, W. U., & Laila, N. N. (2021). Studi Pemahaman dan Perilaku Keselamatan Berkendara (Safety Riding) pada Remaja dan Usia Produktif di Pulau Jawa. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 20(3), 118–126. <https://doi.org/10.33221/jikes.v20i3.1480>
- Sabrina, D., Tinumbia, N., & Ihsani, I. (2022). Analisis Tingkat Keselamatan Lalu Lintas Pada Simpang Tidak Bersinyal Dengan Metode Traffic Conflict Technique (TCT) Studi Kasus Simpang Tiga Jalan Raya Tanah Baru – Jalan Raya Sawangan. *Jurnal ARTESIS*, 2(2), 116–122.
- Sahara, S., & Syuhada, F. (2023). Analisis Karakteristik Perilaku Pengendara Generasi Z Terhadap Keselamatan Lalu Lintas Di Universitas Negeri Jakarta. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(10), 2012–2023.
- Sidik, M. F., Nining, R., & Amalia, D. R. (2022). Sistem Informasi Keselamatan Berbasis Web Sebagai Media Panduan Keselamatan Lalu Lintas (Studi Kasus: Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon). *(Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 6(1), 408–414.
- Sidjabat, S., Handayani, S., & Suryobuwono, A. A. (2022). Sosialisasi Sadar Keselamatan Berlalu Lintas Pada Siswa SMA Negeri 8 Jakarta. *Jurnal Abdimas Transportasi & Logistik*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.54324/j.atl.v2i1.532>
- Simanjuntak, N. F. M., Labolo, M., & Rusfianda, Y. (2024). Penguatan Peran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Studi Penyelenggaraan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Daerah). *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 10(1), 111–126. [https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(1\).17010](https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).17010)
- Siswanto, J., Hidayati, T. S., Hadi, S., & Ayu, B. P. S. B. R. (2023). Penyuluhan Keselamatan Berlalu Lintas Pada Smk Negeri 2 Subang. *Abdimas Galuh*, 5(1), 658. <https://doi.org/10.25157/ag.v5i1.10002>
- Arista, A., Fauzi, R., & Elisa, E. (2023). Pembinaan Siswa/I Smk Widya Batam Terhadap Program Keselamatan Berlalu Lintas Dalam Etika Berkendara. *Puan Indonesia*, 4(2), 249–254.